


LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR 52 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINANDAN NONPERIZINAN
 TERINTEGRASI

1 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

 BUPATI NUNUKAN	NOMOR SOP	: A. 1
	TANGGAL PEMBUATAN	: 19 NOVEMBER 2020
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	: 28 DESEMBER 2020
	DISAHKAN OLEH	BUPATI NUNUKAN ttd <u>ASMIN LAURA HAFID</u>
NAMA SOP	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 08/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional 11. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan. 12. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan.		1. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Data 2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Sistem dan Prosedur Perijinan 3. Mengetahui Tugas dan Fungsi Mekanisme Pembuatan Laporan

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Izin Lokasi / Izin Lokasi Perairan (Optional) 2. Izin Lingkungan 3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 4. Berita Acara Hasil Validasi	1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran 2. Kartu Kendali Perizinan 3. Komputer / Printer / Scanner 4. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila ada rangkaian kerja yang terlambat dilaksanakan maka pelaksanaan urutan kegiatan berikutnya akan tertunda	Disimpan sebagai data Manual dan Elektronik